



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2022-2026.

- (2) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Pasal 2

Maksud disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai gambaran dan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - c. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi;
 - d. BAB IV : Monitoring dan Evaluasi;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing – masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Maret 2022
BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022 - 2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 - 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju perlu dituntut adanya perubahan birokrasi yang mampu bersinergi dengan perubahan yang sedang terjadi. Disamping mengikuti perkembangan zaman, perubahan diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya dalam melakukan perubahan dimaksud yang disebut dengan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut pemerintah harus mampu mendorong perbaikan serta mampu meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah di wilayahnya.

Dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur dan berkelanjutan, maka perlu adanya suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut merupakan bentuk dari operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai dokumen rencana kerja yang terperinci dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Dokumen ini digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) Area Perubahan sehingga tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat tercapai.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 bertujuan untuk memberikan arah dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang tertuang dalam Misi ketiga dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 yaitu:

“Mewujudkan birokrasi yang professional, progresif, bersih dan akuntabel” dengan indikator sasaran Reformasi Birokrasi, antara lain 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2) Birokrasi yang Kapabel; dan 3) Pelayanan Publik yang Prima yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menegaskan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Blora agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 adalah:

1. mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan;

2. mewujudkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima;
3. mendorong upaya monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Blora.

1.4 Manfaat

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.5 Sistematika

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi;
- d. Bab IV : Monitoring dan Evaluasi;
- e. Bab V : Penutup.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

2.1 Pelaksanaan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Kabupaten Blora ditempuh dengan melakukan langkah-langkah kegiatan yang mengarah ke area perubahan dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Adapun capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016-2020 pada Sasaran Reformasi Birokrasi disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum daerah lainnya dan dengan produk hukum pusat; 2. Telah menggunakan aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum); 3. Telah menyebarluaskan produk hukum melalui cetak dan penyebarluasan produk hukum daerah serta <i>website</i>: www.jdih.blorakab.go.id 4. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis.
		Area Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya penanganan gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Blora telah menindaklanjuti dengan dibentuknya UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) Kabupaten Blora; 2. Telah dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Blora;

NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan pemeriksaan dan pembinaan di Perangkat Daerah; 4. Seluruh Pejabat Struktural (Eselon II-IV) telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Negara (LHKPN); 5. Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan pencaangan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; 6. Telah dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WBS) bagi seluruh Perangkat Daerah; 7. Telah dilaksanakannya survey eksternal terkait Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dievaluasi oleh Kemen PANRB; 8. Telah memperoleh Opini BPK atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Blora mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014-2020.
		Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Blora telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan telah dievaluasi oleh Kemen PANRB mendapat predikat B (baik).
2	Birokrasi yang Kapabel	Area Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora dan menyusun <i>Road Map</i> RB Kabupaten Blora dengan Peraturan Bupati dan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati; 2. Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya kerja SAMIN (Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013) dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kode etik PNS.

NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI
		Area Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; 2. Telah dilakukan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 3. Telah dilakukan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan dari Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional.
		Area Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dengan menggunakan sistem CAT; 2. Rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah dilakukan melalui seleksi terbuka.
3	Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Prima	Area Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakannya pelatihan penyusunan peta proses bisnis bagi semua Perangkat Daerah; 2. Telah disusun SPP dan SOP oleh seluruh Perangkat Daerah; 3. Telah diterapkan <i>e-Government</i> yang meliputi: <i>e-audit, e-planing, e-budgeting, e-finance, e-asset, e-procurement</i>, SIMPEG dsb; 4. Telah dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan telah dievaluasi oleh Kemen PANRB dengan predikat Baik; 5. Pengelolaan Arsip yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Blora ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
		Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI
			2. Semua Unit Pelayanan Publik telah menerapkan maklumat Pelayanan dan SOP.

Data capaian arah perubahan pada Area Deregulasi Kebijakan dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Area Deregulasi Kebijakan

NO	AREA DEREGULASI KEBIJAKAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyusunan Produk Hukum						
	PERDA	13	25	24	21	7	11
	PERATURAN BUPATI	85	75	79	71	89	87
	Pengawasan Produk Hukum						
	Evaluasi	5	4	6	6	6	4
	Fasilitasi	85	89	90	79	82	86

Data capaian arah perubahan pada Area Penguatan Pengawasan dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Area Penguatan Pengawasan

NO	AREA PENGUATAN PENGAWASAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Penerapan SPIP	2,8	3,1	3,1	3,2	3,2	2,9
	Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2	2
	Kepatuhan LHKPN	32	67	161	785	751	782
	Usulan Unit WBK	na	na	1	1	1	5
	Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	4	1	25	3	7	2
	Capaian KORSUPGAH	na	na	60,31	65,4	71,36	83,11
	Survey eksternal IPAK	na	na	na	3,58	3,20	3,20
	Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Data capaian arah perubahan pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Capaian Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO	Area Penguatan Akuntabilitas kinerja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Nilai SAKIP	52,07	57,19	61,22	62,22	63,67	64,12

Data capaian arah perubahan pada Area Manajemen Perubahan dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Area Manajemen Perubahan

NO	Area Manajemen Perubahan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Indeks RB	na	na	na	55,98	56,11	57,09

Data capaian arah perubahan pada Area Penguatan dan Penataan Organisasi dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Capaian Area Penguatan dan Penataan Organisasi

NO	Area Penguatan dan Penataan Organisasi	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Nilai kematangan organisasi daerah	-	-	-	-	36	41
	Restrukturisasi PD	43	44	44	44	44	43
	Restrukturisasi UPT	107	107	85	85	87	87

Data capaian arah perubahan pada Area Penataan Manajemen SDM dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Area Penataan Manajemen SDM

NO	AREA PENATAAN MANAJEMEN SDM	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Indeks Profesional ASN	na	na	47	69,8	76	-

NO	AREA PENATAAN MANAJEMEN SDM	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diklat PIM Pola Baru						
	PIM II	2	2	1	0	0	0
	PIM III	4	7	6	12	2	4
	PIM IV	30	30	15	0	0	0
	Open Bidding JPT	4	0	1	7	7	0
	Penerimaan CPNS (CAT)	0	186	477	264	0	68
	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	33	14	20	15	16	16

Data capaian arah perubahan pada Area Penataan tata Laksana dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Capaian Area Penataan Tata Laksana

NO	Area Penataan Tata Laksana	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	OPD yang menyusun SOP	28	34	40	44	44	44
	Jumlah Paket Selesai di ULP /LPSE	283	284	367	389	271	199
	Indeks SPBE	na	na	2,06	2,65	2.76	2,8

Data capaian arah perubahan pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Capaian Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Nilai IKM	na	na	84,82	80,88	78,75	83,35
	UPP dengan SP Lengkap	na	na	71	49	42	42
	UPP menyusun SKM	na	na	48	42	35	35

2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Di dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu melakukan identifikasi harapan Pemangku Kepentingan.

Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu berdasarkan isu strategis/masalah atau pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu/masalah tersebut. Tujuan dari identifikasi ini adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan Pemangku Kepentingan sehingga diharapkan pelaksanaan tersebut akan mendapat dukungan, baik dari pihak internal maupun eksternal birokrasi.

Adapun hasil dari identifikasi kebutuhan *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan berdasarkan pada 3 (tiga) Sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana yang tertuang di dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dan 8 (delapan) area perubahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Identifikasi Kebutuhan Pemangku Kepentingan

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	KEBUTUHAN / HARAPAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Deregulasi Kebijakan	Melakukan tindak lanjut atas hasil identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan	• Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan Perundang-Undangan secara berkala untuk penyempurnaan produk hukum yang dibentuk	• Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
		Pengawasan	Meningkatkan kapabilitas, kompetensi APIP agar lebih berperan untuk memastikan segala kebijakan pengawasan terimplementasi dengan baik dan melakukan Monitoring dan	• Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	KEBUTUHAN / HARAPAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
			Evaluasi atas kebijakan tersebut yang akan memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan		
			Mendorong dan memastikan pembangunan <i>Zona Integritas</i> menuju WBK/WBBM berjalan lebih optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat Daerah 	Seluruh Perangkat Daerah
		Akuntabilitas	Melakukan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama agar tercipta keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja dari Level Kabupaten sampai ke individu pegawai dan meningkatkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja ke seluruh Perangkat Daerah melalui perbaikan sistem informasi pengukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Inspektorat Daerah • Bagian Organisasi • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan <i>reviu</i> terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU untuk memastikan anggaran yang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPPKAD • Bagian Administrasi Pembangunan 	Seluruh Perangkat Daerah

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	KEBUTUHAN / HARAPAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
2	Birokrasi yang Kapabel	Manajemen Perubahan	Melakukan internalisasi pelaksanaan RB secara masif dari tingkat Pusat hingga SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi • Inspektorat Daerah 	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Pokja Tim RB Pelaksana RB Kabupaten 	Seluruh Perangkat Daerah
		Penataan Organisasi	Melakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang mengarah pada penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
		SDM Aparatur	<p>Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti hasil <i>assessment</i> sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi</p> <p>Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh dan memetakan talent/<i>talent pool</i> sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKD • Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	KEBUTUHAN / HARAPAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
3	Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Prima	Tata laksana	Melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis yang dimulai dari level Pemda hingga SKPD	• Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP		
		Pelayanan Publik	Menyusun <i>Grand design</i> SPBE yang terpadu dan terintegrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif dan transparan	• Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun Mall Pelayanan Publik	• DPMPTSP • Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik
			Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dalam hal pemberian <i>reward/ punishment</i> kepada pemberi layanan	• Seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik
			Melakukan inovasi layanan	• Seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik
			Menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah	• Seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik

2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Hingga saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka mewujudkan harapan para Pemangku Kepentingan. Berikut diuraikan beberapa permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11.

Permasalahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

NO.	AREA PERUBAHAN	MASALAH	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1	Deregulasi Kebijakan	Masih terdapat Perda yang belum harmonis, karena terkendala pembatasan jumlah judul yang harus dimuat dalam Propemperda	• Bagian Hukum
		Monitoring dan Evaluasi atas sistem pengendalian peraturan perundang-undangan belum optimal	• Bagian Hukum
2	Pengawasan	Implementasi kebijakan pengawasan internal belum optimal	• Inspektorat Daerah
		Hasil Monitoring dan Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu ditingkatkan pemanfaatannya	
3	Akuntabilitas	Implementasi SAKIP masih belum berdasarkan kinerja utama sehingga terdapat beberapa indikator tujuan/sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, sehingga berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya	• Bappeda • Bagian Organisasi • Inspektorat Daerah
		Evaluasi atas program yang dilaksanakan belum berfokus pada efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang mengacu kinerja utama berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakefektipan penggunaan anggaran	• Bappeda • BPPKAD
4	Manajemen Perubahan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi impelemtasinya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh semua SKPD	• Bagian Organisasi • Inspektorat Daerah

NO.	AREA PERUBAHAN	MASALAH	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		Tim Pelaksanaan RB Belum melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi • Inspektorat Daerah
5	Penataan Organisasi	Belum sepenuhnya menerapkan penyederhanaan birokrasi secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi
6	Tatalaksana	Penyusunan Peta Proses Bisnis belum mengacu pada kinerja utama pada semua SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi
7	SDM Aparatur	Sistem manajemen SDM belum diterapkan secara optimal dan menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> • BKD • Bagian Organisasi
8	Pelayanan Publik	Penerapan <i>e-Gov</i> belum sepenuhnya terintegrasi karena belum adanya <i>grand design</i> pengembangan aplikasi antar SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkominfo
		Belum sepenuhnya diterapkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat di seluruh unit pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTP • Bagian Organisasi
		Belum semua unit pelayanan publik yang menerapkan pemberian <i>reward/punishment</i> kepada pemberi layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik
		<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pengetahuan SDM pemberi layanan/unit pelayanan dalam membuat inovasi pelayanan publik • Belum terwujud pelayanan terintegrasi berbasis IT 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik
		Belum adanya komunikasi secara intens di unit pelayanan terkait dengan perbaikan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI

3.1. Arah *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional

Berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 -2024 bahwa tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah: **“Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”** dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. *Ease of Doing Business* (Kemudahan Melakukan Berbisnis);
2. *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi);
3. *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan).

Target indikator sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
Nasional Tahun 2020-2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2019	TARGET 2024
1	Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	- <i>Ease of Doing Business</i> - <i>Corruption Perceptions Index</i>	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	NA	100%
				Nilai SAKIP	96,40 %	100%
				Opini BPK	94%	100%
		- <i>Government Effectiveness Index</i>	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan	NA	100%
				Indeks SPBE	74 %	100%
				IP ASN	65,7	100
		Pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	59,52%	100%	

3.2. Arah *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Visi Provinsi Jawa Tengah yaitu: **“ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”** yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI;

2. mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks RB	77	80	81	82	83
			IKM	80	82	84	86	88
			Indeks SPBE	2.76	2.88	3.00	3.12	3.24
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	80	82	83	84	85
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.68	3.69	3.70	3.71	3.72
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan	Nilai Peringkat Komposit Perangkat Daerah Provinsi Jateng	42	50	55	61	62
			Indeks Sistem Merit	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71

3.3. Arah Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora

3.3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026, Visi Kabupaten Blora adalah: **“*Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing*”**

Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. **Sesarengan Mbangun Blora**

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan *stakeholder* terkait termasuk pihak swasta.

2. **Unggul**

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki.

3. **Berdaya Saing**

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Blora dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan ditempuh dengan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel;
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif;
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Agar tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan *Road Map* Reformasi Birokrasi dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang dirinci melalui Rencana Aksi sebagaimana tertuang pada lampiran.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Blora

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			b. Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek; c. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit (<i>Merit Sistem</i>).
2		Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	a. Pengembangan e-government untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau; b. Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM Persandian; c. Peningkatan Implementasi single data didukung teknologi informasi terintegrasi.
3		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan langsung kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM pelayanan publik.

3.3.2. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora

Untuk mewujudkan keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Blora telah ditetapkan rencana capaian dengan indikator dan target kinerja sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Rencana Capaian Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	60,2	62	65	67	69	71
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65 B	70,2 BB	72,5 BB	75 BB	77,5 BB	80 A
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks MRI	1,67	1,93	2,20	2,47	2,73	3,00
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	20	21	23	25	26	29
IP ASN		76	76	76,5	76,5	77	77	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	71,5	73	74	74,5	75	75,5
		Indeks SPBE	2,86	2,96	3	3,06	3,1	3,15

3.3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2022-2026, maka perlu dilakukan penjabaran melalui program dan kegiatan prioritas agar berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ini merupakan program dan kegiatan prioritas untuk pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2026.

A. Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, perlu upaya perbaikan pada area Deregulasi Kebijakan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan.

1. Area Deregulasi Kebijakan

Banyaknya peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis adalah merupakan permasalahan dalam area deregulasi kebijakan. Penataan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan Perundang-Undangan yang diharapkan dapat mewujudkan penyusunan produk hukum yang harmonis dan partisipatif. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Target Capaian Area Deregulasi Kebijakan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Revisi Produk Hukum, harmonisasi	Produk hukum	3	3	2	2	2	Bagian Hukum
Persentase produk hukum yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.6
Kegiatan Prioritas Area Deregulasi Kebijakan

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD PENGAMPU
			2022	2023	2024	2025	2026	
Koordinasi/fasilitasi, identifikasi penyesuaian produk hukum yang masih tumpang tindih, tidak optimal	Produk Hukum	4	4	4	4	4	4	Bagian Hukum
Evaluasi produk hukum yang akan diterbitkan	Produk Hukum	3	3	4	3	3	3	Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan PERDA	Perda	11	13	11	11	15	15	Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan PERATURAN BUPATI	Peraturan Bupati	83	85	85	85	85	85	Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan SK Bupati	SK	577	300	300	300	300	300	Bagian Hukum
Membangun aplikasi sistem pengendalian produk hukum	Aplikasi	-	1	1	1	1	1	Bagian Hukum

2. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area penguatan akuntabilitas kinerja ditempuh dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat, yang bertujuan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun hasil yang diharapkan pada area penguatan akuntabilitas kinerja yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem perencanaan, keuangan dan kinerja secara terintegrasi.
- b. Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Target Capaian Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Nilai SAKIP	Angka 1-100	65	70,2	72,4	75	77,5	80

Tabel 3.8
Kegiatan Prioritas Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA					SKPD Pengampu
		2022	2023	2024	2025	2026	
Fasilitasi /pendampingan SAKIP SKPD	SKPD	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi Inspektorat Daerah Bappeda
Pengembangan SAKIP SKPD	SKPD	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi Dinkominfo

3. Area Penguatan Pengawasan

Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif yang terjadi dalam birokrasi, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk merubah perilaku tersebut dengan penguatan sistem pengawasan. Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasan adalah:

- Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- Meningkatnya Opini WTP dari BPK;
- Meningkatnya Maturitas SPIP;
- Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Target Capaian Area Penguatan Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas laporan keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level	1,67	1,93	2,20	2,47	2,73	3,00
Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3

Tabel 3.10
Kegiatan Prioritas Area Pengawasan

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD Pengampu
			2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Pengelolaan tertib administrasi keuangan	SKPD	44	43	43	43	43	43	BPPKAD
Audit Laporan Keuangan	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Advokasi Pemenuhan Laporan LHKPN	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Advokasi Pemenuhan Laporan LHKASN	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Penerapan SPIP	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Penanganan Benturan Kepentingan	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Pengelolaan WBS	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah

B. Program Peningkatan Efisiensi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen SDM Aparatur dilakukan upaya perbaikan pada area perubahan manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan manajemen SDM Aparatur.

1. Area Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan ditempuh dengan berbagai upaya untuk merubah mental dan perilaku aparatur agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan berintegritas tinggi serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Hasil yang diharapkan pada area manajemen perubahan yaitu:

- a. meningkatnya integritas aparatur;
- b. meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk target indikator capaian dan kegiatan prioritas pada area manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Target Capaian Area Manajemen Perubahan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Indeks RB	Angka 1-100	62	64	67	71	73	75

Tabel 3.12
Kegiatan Prioritas Area Manajemen Perubahan

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD Pengampu
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pembangunan Budaya Integritas	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD	44	43	43	43	43	43	Inspektorat Daerah
Pengembangan budaya kerja	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi

2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi pemerintah daerah diperlukan untuk mengubah sistem kelembagaan guna mendorong efisiensi, efektivitas, serta percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan.

Hasil yang diharapkan pada area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja.

Untuk target indikator capaian dan kegiatan prioritas pada area penataan dan penguatan organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Target Capaian Area Penataan dan Penguatan Organisasi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Nilai Tingkat Kematangan organisasi daerah (Pemerintah Daerah)	Angka	20	21	23	25	26	29

Tabel 3.14
Kegiatan Prioritas Area Penataan dan Penguatan organisasi

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD PENGAMPU
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pengembangan efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada area penataan sistem manajemen SDM Aparatur ditempuh dengan penerapan sistem manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian dan menghasilkan pegawai yang profesional. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.

Hasil yang diharapkan pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yaitu terkelolanya penerapan sistem manajemen sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi, transparan serta berbasis merit.

Untuk target indikator capaian dan kegiatan prioritas pada area manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Target Capaian Area Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Profesional ASN	Angka 1-100	76	76	76,5	76,5	77	77

Tabel 3.16
Kegiatan Prioritas Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD PENGAMPU
			2022	2023	2024	2025	2026	
Perencanaan kebutuhan pegawai	SKPD	44	43	43	43	43	43	BKD
ANJAB dan ABK	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	SKPD	44	43	43	43	43	43	BKD
Pelaksanaan evaluasi jabatan	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Promosi jabatan secara terbuka.	ASN	7	9	6	2	1	4	BKD

C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kegiatan prioritas yang perlu dilakukan terkait dengan area tatalaksana dan area peningkatan pelayanan publik.

1. Area Peningkatan Pelayanan Publik

Area Perubahan pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat.

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Hasil yang diharapkan pada area pelayanan publik adalah:

- a. Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat;
- b. Pelayanan publik yang terintegrasi.

Target capaian dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan keberhasilan area pelayanan publik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17
Target Capaian Area Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	71,5	73,0	74,0	75,5	75	75,5
Persentase Unit pelayanan yang memiliki SKM "baik"	%	72	75	78	80	83	83

Tabel 3.18
Kegiatan Prioritas Area Peningkatan Pelayanan Publik

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD PENGAMPU
			2022	2023	2024	2025	2026	
Fasilitasi/ Pendampingan SKM	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Fasilitasi/ Pendampingan Penyusunan Standart Pelayanan	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Fasilitasi Pendampingan Pengembangan inovasi pelayanan publik	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi Dinkominfo

2. Area Penataan Tatalaksana

Pada area tatalaksana di instansi pemerintah masih menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu perubahan sistem tatalaksana sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dengan hasil peningkatan efisiensi, efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur.

Target capaian dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan tatalaksana yang baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19
Target Capaian Area Penataan Tatalaksana

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Indeks SPBE	Indeks	2,86	2,96	3	3,05	3,1	3,15
Indeks Kearsipan	Angka	65	69	71	73	75	77
Persentase sistem pengelolaan kearsipan yang terintegrasi							
Persentase Unit pelayanan yang memiliki nilai SKM "baik"	%	72	75	78	80	83	83

Tabel 3.20
Kegiatan Prioritas Area Penataan Tatalaksana

KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA					SKPD PENGAMPU
			2022	2023	2024	2025	2026	
Fasilitasi/ Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	SKPD	44	43	43	43	43	43	Bagian Organisasi
Pembinaan Penataan Kearsipan	SKPD	44	43	43	43	43	43	DPK
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	SKPD	44	43	43	43	43	43	Dinkominfo
Pengelolaan e- procurement melalui UKPBJ	Jumlah Pengadaan	250	250	250	250	250	250	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi berbagi pakai	Jumlah aplikasi	-	-	1	-	-	1	Dinkominfo

D. Quick Wins, Fokus Perubahan dan Prioritas Reformasi Birokrasi

➤ Quick Wins

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan secara nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam rangka melakukan upaya tersebut, pemerintah membuat suatu program yang disebut dengan *Quick Wins* yang merupakan suatu langkah inisiatif yang dilakukan untuk mengawali suatu program besar.

Quick Wins dilakukan di awal yang dalam pelaksanaannya terkait dengan program 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, antara lain deregulasi kebijakan, pengawasan, akuntabilitas, manajemen perubahan, penataan organisasi, tata laksana, SDM Aparatur dan pelayanan publik.

Dari kedelapan area perubahan tersebut, dipilih area perubahan pelayanan publik sebagai *Quick Wins* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan perubahan-perubahan secara cepat dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sehingga masyarakat akan merasakan perubahan-perubahan yang signifikan;
2. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan publik akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga timbul kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Adapun program yang dijadikan sebagai *Quick Wins*, sebagaimana yang telah tertuang di dalam program kerja 99 (sembilan puluh sembilan) hari Bupati Blora, antara lain:

1. Pembangunan Mall Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Blora Satu Data;
3. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi.

Tabel 3.21
Target Inovasi Perangkat Daerah

KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
Pendampingan Inovasi	Perangkat Daerah	44	43	43	43	43	43
Kompetisi inovasi	Perangkat Daerah	20	20	20	20	20	20
Pengiriman hasil inovasi	Inovasi	10	10	10	10	10	10

➤ Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Manajemen Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat berjalan secara baik, maka perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun Tim Pengelola Reformasi Birokrasi tersebut sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel.3.21

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1. Ketua Tim Pengarah	Bupati
2. Wakil Ketua	Wakil Bupati
3. Sekretaris	Sekretaris Daerah
4. Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bupati

Tabel.3.22

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1. Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah
2. Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda
3. Anggota	1. Inspektur Daerah 2. Kepala Bappeda 3. Kepala BKD 4. Kepala BPPKAD 5. Kepala Dinkominfo 6. Kepala DPMPTSP 7. Kepala DPK 8. Kepala Bagian Hukum Setda 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Tabel.3.23

Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora

NO	KELOMPOK KERJA	SKPD
1	Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan	1. Inspektorat Daerah 2. Bappeda 3. BKD 4. Bagian Organisasi

NO	KELOMPOK KERJA	SKPD
2	Kelompok Kerja Area Deregulasi Kebijakan	Bagian hukum
3	Kelompok Kerja Area Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Bappeda 2. BKD 3. BPPKAD 4. Bagian Organisasi 5. Bagian hukum
4	Kelompok Kerja Area Penataan Tatalaksana	1. DPK 2. Dinkominfo 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Hukum 5. Bagian Pengadaan Barang dan jasa
5	Kelompok Kerja Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Inspektorat Daerah 2. BKD 3. Bappeda 4. Bagian Organisasi
6	Kelompok Kerja Area Penguatan Pengawasan	1. Inspektorat Daerah 2. BKD 3. Bagian Organisasi
7	Kelompok Kerja Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BKD 4. BPPKAD 5. Dinkominfo 6. Bagian Adminitrasi Pembangunan 7. Bagian Organisasi
8	Kelompok Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. DPMPSTP 2. BKD 3. Dinkominfo 4. Bagian Organisasi

➤ Analisis resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko

Setiap pelaksanaan perubahan dalam Reformasi Birokrasi pasti banyak muncul resiko yang dapat menghambat pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Resiko tersebut dapat berupa berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan hasil dari perubahan dimaksud.

Apabila hambatan dan tantangan tersebut tidak dikenali, diinventarisir dengan baik, dan kemudian ditentukan solusinya, maka apa yang direncanakan tentunya tidak dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan capaian pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan capaian Reformasi Birokrasi, perlu dipetakan secara baik dan dicarikan solusi yang tepat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Hambatan dan Solusi

NO	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Lemahnya komitmen Pimpinan dan Aparatur terhadap program Reformasi Birokrasi	Perlunya sosialisasi secara intensif tentang tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2	Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi berjalan secara parsial dan instansional	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya dilakukan sinergitas program dan evaluasi secara terpadu • Perlu membentuk <i>task force</i> untuk memacu Reformasi Birokrasi
3	Kurangnya informasi dan saluran komunikasi terkait dengan progress capaian dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Diperlukan evaluasi secara rutin dan menyampaikan informasi hasilnya kepada pimpinan

➤ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Kabupaten Blora

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun juga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyokong hasil akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan masing-masing mempunyai bobot yang sama (50%).

Komponen evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sama. Komponen evaluasi tersebut ada dua, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sama dengan Komponen Pengungkit pada evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Bobot Komponen Pengungkit tersebut 60% yaitu:

- a. Pemenuhan bobot 20% terdiri dari (1) Manajemen Perubahan (2%), (2)Deregulasi Kebijakan (2%), (3) Penataan Dan Penguatan Organisasi (3%), (4)Penataan Tatalaksana (2,50%), (5)Penataan Sistem Manajemen SDM (3%), (6) Penguatan Akuntabilitas (2,50%), (7) Penguatan Pengawasan (2,50%), (8) Peningkatan Kualitas pelayanan Publik (2,50%).
- b. Hasil Antara Area Perubahan bobot 10 terdiri dari (1) Kualitas Pengelolaan Arsip (1%), (2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (1%),(3) Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%), (4) Kualitas Pengelolaan Aset (1%), (5) Merit Sistem (1%), (6) ASN Profesional (1%), (7) Kualitas Perencanaan (1%), (8) Maturitas SPIP (1%), 8) Kapabilitas APIP (1%), (10) Maturitas SPIP (1%), (11) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009 (1%)
- c. Reform bobot 30 terdiri dari (1) Manajemen Perubahan (3%), (2) Deregulasi Kebijakan(3%), (3)Penataan Dan Penguatan Organisasi (4,50%), (4) Penataan Tatalaksana (3,75%), (5) Penataan Sistem Manajemen Sdm (4,50%), (6) Penguatan Akuntabilitas (3,75%), (7) Penguatan Pengawasan (3,75%), (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)

Sedangkan Komponen hasil dengan bobot 40%, meliputi:

- a. Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan bobot 10%, terdiri dari (1) Opini BPK bobot 3, (2) Nilai SAKIP bobot 7
- b. Kualitas Pelayanan Publik bobot 10%, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
- c. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN bobot 10%, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
- d. Kinerja Organisasi bobot 10% terdiri dari (1) Capaian Kinerja bobot 5, (2) Kinerja Lainnya bobot 2, (3) Survei Internal Organisasi bobot 3

Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Blora wajib menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. *Road Map* Reformasi Birokrasi ditingkat Perangkat Daerah memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan, disertai indikator dan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

A. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi koordinator dari Inspektorat Daerah dengan cara kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dengan sebagaimana yang direncanakan dalam rencana aksi melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja;
- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala;
- c. Pengelolaan Pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

B. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Perangkat Daerah

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah melalui:

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala;
- b. Pengelolaan Pengaduan;
- c. Pengukuran target-target yang ditetapkan;
- d. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora dilaksanakan oleh Tim Pokja (Perangkat Daerah Pengampu) pada masing-masing area perubahan.
 - Monev pelaksanaan PMPRB Pemerintah Kabupaten Blora oleh Tim Pelaksana dengan koordinator dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

4.2 Waktu Pelaksanaan

- Monitoring dan Evaluasi area perubahan Reformasi Birokrasi dilaksanakan triwulan atau semester.
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora secara keseluruhan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

4.3 Anggaran Monitoring dan Evaluasi

- Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora secara keseluruhan dibebankan kepada Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.
- Anggaran Monitoring dan Evaluasi masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi dibebankan pada Perangkat Daerah Pengampu melalui kegiatan sesuai dengan Tupoksinya.

4.4 Instrumen Monitoring dan Evaluasi

- Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian PAN-RB.
- Formulir yang berisi capaian atas indikator-indikator Reformasi Birokrasi, sesuai dengan indikator-indikator sasaran dan indikator area perubahan Reformasi Birokrasi.
- Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan kebutuhan data perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diinginkan.

4.5 Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora disampaikan Kepada Bupati Blora

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan Reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah Pengampu Program/Kegiatan fokus perubahan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sehingga dapat terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora 2022-2026 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para Pemangku Kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Blora dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi Monitoring dan Evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Blora harus terus dibangun agar dapat tercipta tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan Reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah Pengampu Program/Kegiatan fokus perubahan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sehingga dapat terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora 2022-2026 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para Pemangku Kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Blora dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi Monitoring dan Evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Blora harus terus dibangun agar dapat tercipta tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2022 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BLORA

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
1.	Manajemen Perubahan							
a.	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan							
	• Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Menyusun Tim reformasi Birokrasi 2022-2026	Konsolidasi dan koordinasi tim Reformasi Birokrasi	Konsolidasi dan koordinasi tim Reformasi Birokrasi	Konsolidasi dan koordinasi tim Reformasi Birokrasi	Konsolidasi dan koordinasi tim Reformasi Birokrasi	• Bagian Organisasi	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi
	• Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins	Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi capaian indikator dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi capaian indikator dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi capaian indikator dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi capaian indikator dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	• Bagian Organisasi	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi
	• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2022	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2023	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2024	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2025	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2026	• Bagian Organisasi	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 	Sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Organisasi 	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah 	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi
b.	Penataan Pola Pikir dan Budaya kerja							
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan nilai-nilai budaya kerja di Perangkat Daerah 	Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan komitmen Perangkat Daerah terhadap program Reformasi Birokrasi 	Monitoring dan Evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Budaya Kerja Pegawai 	Monitoring dan Evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi adanya agen perubahan 	- Pembentukan agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah	- Penyusunan Rencana Kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah	- Penyusunan Rencana Kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah	- Penyusunan Rencana Kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah	- Penyusunan Rencana Kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Perangkat Daerah 	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah - Pelaksanaan rencana kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rencana kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi implementasi agen perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - elaksanaan rencana kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah - onitoring dan Evaluasi implementasi agen perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rencana kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi implementasi agen perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rencana kerja agen perubahan di tingkat Perangkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi implementasi agen perubahan 		
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan							
a.	Evaluasi dan identifikasi peraturan Perundang-Undangan berkelanjutan							
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan Peraturan Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim penyusunan draft - Rapat koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim penyusunan draft - Rapat koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim penyusunan draft - Rapat koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim penyusunan draft - Rapat koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim penyusunan draft - Rapat koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum 	Seluruh Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi 		

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi produk hukum (tumpang tindih, bertentangan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Hukum 	Seluruh Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Revisi produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim penyusunan draft Rapat koordinasi Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Hukum 	Seluruh Perangkat Daerah
b.	Harmonisasi produk hukum yang diterbitkan							
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Hukum 	Seluruh Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Sistem pengendalian produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Monev Implementasi aplikasi JDIH Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Monev Implementasi aplikasi JDIH Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Monev Implementasi aplikasi JDIH Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Monev Implementasi aplikasi JDIH Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Monev Implementasi aplikasi JDIH Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Hukum 	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
3	Penataan dan Penguatan Organisasi							
a.	Evaluasi Kelembagaan	- Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	- Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah M	- Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	- Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	- Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah
b.	Penataan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah - Penilaian Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah P - Penilaian Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah P 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah - Penilaian Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah - Penilaian Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah - Penilaian Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah
4.	Penataan Tatalaksana							
a.	Penyusunan Proses Bisnis	Menyusun Proses Bisnis	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
b.	Evaluasi SOP	Monitoring dan Evaluasi dan fasilitasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi dan fasilitasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi dan fasilitasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi dan fasilitasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi dan fasilitasi penyusunan SOP	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
c.	Evaluasi penerapan Proses Bisnis	-	Monitoring dan Evaluasi penerapan Proses Bisnis	Monitoring dan Evaluasi penerapan Proses Bisnis	Monitoring dan Evaluasi penerapan Proses Bisnis	Monitoring dan Evaluasi penerapan Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
d.	Pembinaan penataan Kearsipan	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	• DPK	Seluruh Perangkat Daerah
e.	Evaluasi pelaksanaan Kearsipan Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	• DPK	Seluruh Perangkat Daerah
f.	Implementasi SPBE (<i>e-government</i>)	Penguatan domain kebijakan, tatakelola dan layanan SPBE	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah	• Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
g.	Penguatan keterbukaan informasi publik (<i>open government</i>)	Peningkatan badan publik yang terbuka	Peningkatan badan publik yang terbuka	Peningkatan badan publik yang terbuka	Peningkatan badan publik yang terbuka	Peningkatan badan publik yang terbuka	• Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
h.	Penerapan <i>e-procurement</i> melalui Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	• Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Seluruh Perangkat Daerah
i.	Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	• Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Seluruh Perangkat Daerah
j.	Pengaduan pelayanan publik terintegrasi	-	-	Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan publik terintegrasi	Evaluasi pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan publik	Evaluasi pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan publik	• Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia							
a.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	• BKD	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
b.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Analisis jabatan - Fasilitasi, penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Analisis jabatan - Fasilitasi, penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Analisis jabatan - Fasilitasi, penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Analisis jabatan - Fasilitasi, penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Analisis jabatan - Fasilitasi, penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh Perangkat Daerah
c.	Proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah
d.	Pengembangan pegawai sesuai kebutuhan kompetensi	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah
e.	Promosi jabatan secara terbuka	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah
f.	Penetapan sasaran kerja pegawai	Implementasi SKP	Implementasi SKP	Implementasi SKP	Implementasi SKP	Implementasi SKP	<ul style="list-style-type: none"> • BKD 	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
g.	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	• BKD	Seluruh Perangkat Daerah
h.	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	• Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
i.	Pengembangan jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	• BKD	Seluruh Perangkat Daerah
j.	Melakukan Pemetaan Kompetensi	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Melakukan assessment	• BKD	Seluruh Perangkat Daerah
k.	Pengembangan aplikasi simpeg	Evaluasi implementasi aplikasi simpeg	Evaluasi implementasi aplikasi simpeg	Evaluasi implementasi aplikasi simpeg	Evaluasi implementasi aplikasi simpeg	Evaluasi implementasi aplikasi simpeg	• BKD	Seluruh Perangkat Daerah
l.	Penyusunan laporan kinerja individu	Pengembangan aplikasi <i>e-kinerja</i> dan <i>e-skp</i>	Pengembangan aplikasi <i>e-kinerja</i> dan <i>e-skp</i>	Implementasi aplikasi integrasi <i>e-kinerja</i> dan <i>e-skp</i>	Evaluasi implemetasi aplikasi terintegrasi	Evaluasi implemetasi aplikasi terintegrasi	• BKD • Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
m.	Tunjangan kinerja	Penyusunan dan perhitungan TPP	Penerapan TPP	Evaluasi dan Penyesuaian TPP	Evaluasi dan Penyesuaian TPP	Evaluasi dan Penyesuaian TPP	• Tim Pelaksana TPP	Seluruh Perangkat Daerah
6.	Penguatan Akuntabilitas							
a.	Penyusunan RPJMD	Penyusunan dan publikasi RPJMD	-	Evaluasi RPJMD	-	Evaluasi RPJMD	• Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
b.	Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan RKPD 2022 - Musyawarah rencana Pembangunan RKPD 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan RKPD 2023 - Musyawarah rencana Pembangunan RKPD 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan RKPD 2024 - Musyawarah rencana Pembangunan RKPD 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan RKPD 2025 - Musyawarah rencana Pembangunan RKPD 2025 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan RKPD 2026 - Musyawarah rencana Pembangunan RKPD 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda 	Seluruh Perangkat Daerah
c	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah - Penetapan Renstra Perangkat Daerah 	Pengendalian Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Bagian Administrasi Pembangunan 	Seluruh Perangkat daerah
d.	Pengintegrasian sistem aplikasi e-planning, e-budgeting, e-monev, e-sakip dan e-kinerja	Pengintegrasian sistem aplikasi e-planning, e-budgeting, e-monev, e-sakip dan e-kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi • Dikominfo • Bappeda • Inspektorat Daerah 	Seluruh perangkat daerah
	Penyusunan IKU Pemerintah Kabupaten dan IKU Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan IKU Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan IKU Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan IKU Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan IKU Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan IKU Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	- Penyusunan RKT Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan RKT Perangkat Daerah	- Penyusunan RKT Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan RKT Perangkat Daerah	- Penyusunan RKT Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan RKT Perangkat Daerah	- Penyusunan RKT Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan RKT Perangkat Daerah	- Penyusunan RKT Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan RKT Perangkat Daerah	• Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
	Penyusunan Perjanjian Kinerja	- Penyusunan Perjanjian Kinerja - Fasilitasi Penandatanganan PK Perangkat Daerah - Monitoring ketercapaian Perjanjian Kinerja	- Penyusunan Perjanjian Kinerja - Fasilitasi Penandatanganan PK Perangkat Daerah - Monitoring ketercapaian Perjanjian Kinerja	- Penyusunan Perjanjian Kinerja - Fasilitasi Penandatanganan PK Perangkat Daerah - Monitoring ketercapaian Perjanjian Kinerja	- Penyusunan Perjanjian Kinerja - Fasilitasi Penandatanganan PK Perangkat Daerah - Monitoring ketercapaian Perjanjian Kinerja	- Penyusunan Perjanjian Kinerja - Fasilitasi Penandatanganan PK Perangkat Daerah - Monitoring ketercapaian Perjanjian Kinerja	• Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
	Penyusunan LkjIP	- Penyusunan LkjIP Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan LkjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LkjIP Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan LkjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LkjIP Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan LkjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LkjIP Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan LkjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LkjIP Pemerintah Kabupaten Blora - Fasilitasi penyusunan LkjIP Perangkat Daerah	• Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
	Reviu LKjIP	Reviu LKjIP	Reviu LKjIP	Reviu LKjIP	Reviu LKjIP	Reviu LKjIP	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
7.	Penguatan Pengawasan							

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	Monitoring dan Evaluasi pemutakhiran data dan pengawasan daerah	Monitoring dan Evaluasi pemutakhiran data dan pengawasan daerah	Monitoring dan Evaluasi pemutakhiran data dan pengawasan daerah	Monitoring dan Evaluasi pemutakhiran data dan pengawasan daerah	Monitoring dan Evaluasi pemutakhiran data dan pengawasan daerah	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Pemenuhan pelaporan LHKPN & LHKASN	Monitoring dan Evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring dan Evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring dan Evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring dan Evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring dan Evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan LHKPN dan LHKASN	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Penanganan gratifikasi	Laporan gratifikasi ke KPK	Laporan gratifikasi ke KPK	Laporan gratifikasi ke KPK	Laporan gratifikasi ke KPK	Laporan gratifikasi ke KPK	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Pemeriksaan LKPD oleh BPK	- Rekonsiliasi data LKPD - Pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Penguatan sistem pengelolaan keuangan	- Rekonsiliasi data LKPD - Pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Penguatan sistem pengelolaan keuangan	- Rekonsiliasi data LKPD - Pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Penguatan sistem pengelolaan keuangan	- Rekonsiliasi data LKPD - Pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Penguatan sistem pengelolaan keuangan	- Rekonsiliasi data LKPD - Pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Penguatan sistem pengelolaan keuangan	• BPPKAD	Seluruh perangkat daerah
	Penanganan benturan kepentingan	Penerapan aplikasi Benturan Kepentingan	Penerapan aplikasi Benturan Kepentingan	Penerapan aplikasi Benturan Kepentingan	Penerapan aplikasi Benturan Kepentingan	Penerapan aplikasi Benturan Kepentingan	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Pengelolaan WBS	Penyusunan kebijakan <i>Whistle Blowing Sistem</i>	Penerapan aplikasi <i>Whistle Blowing Sistem</i>	Penerapan aplikasi <i>Whistle Blowing Sistem</i>	Penerapan aplikasi <i>Whistle Blowing Sistem</i>	Penerapan aplikasi <i>Whistle Blowing Sistem</i>	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Penerapan SPIP	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	Peningkatan kapabilitas APIP	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Penyelesaian Tindaklanjut pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
	Pembangunan (WBK/WBBM) ZI	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	• Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
	Pengembangan sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan Evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan Evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan Evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan Evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan Evaluasi sistem perizinan online	• DPMPTSP • Dinkominfo	Seluruh perangkat daerah
	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Perumusan Kebijakan, Pengembangan Sistem - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Evaluasi Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Evaluasi Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Evaluasi Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Evaluasi Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	• Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik							
	a. Penerapan <i>reward, punishment</i> untuk pemberi layanan dan konpensasi untuk penerima layanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTSP • Dindukcapil 	Semua Unit Pelayanan
	b. Penerapan standardisasi prosedur pengelolaan pengaduan dan pelayanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • DPMPSTSP • Dindukcapil 	Semua Unit Pelayanan
	c. Penerapan maklumat pelayanan						<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • DPMPSTSP • Dindukcapil 	Semua Unit Pelayanan
	4. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik							
	a. Monitoring dan Evaluasi <i>respon time</i> pengaduan pelayanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • DPMPSTSP • Dindukcapil 	Semua Unit Pelayanan
	b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut dan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • DPMPSTSP • Dindukcapil 	Semua Unit Pelayanan
	5. Kegiatan pengembangan inovasi pelayanan publik						<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Organisasi 	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI PER TAHUN					PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		2022	2023	2024	2025	2026	UTAMA	PENDUKUNG
	a. Pengembangan Budaya Inovasi	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	- BAPPEDA	Seluruh perangkat daerah
	b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	- BAPPEDA	Seluruh perangkat daerah
	c. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi	Perumusan Kebijakan, pengembangan sistem dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	- BAPPEDA	Seluruh perangkat daerah
	d. Peningkatan Inovasi layanan langsung/ jemput bola (<i>direct service</i>)	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Penyempurnaan Pelaksanaan	- BAPPEDA	Seluruh perangkat daerah

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN